

***Diplomasi Paralel dalam Hubungan Internasional Kontemporer: Studi Kota Bandung dalam Jejaring UNESCO Creative Cities Network***

**Muthi Najwa Hanifa, Windy Dermawan**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: [muthinajwa36@gmail.com](mailto:muthinajwa36@gmail.com)

***Abstract***

*This research analyzes the governance and practices of Bandung City's parallel diplomacy in developing its identity as a City of Design. Using the concept of parallel diplomacy, the study examines the roles of governmental and societal actors in international collaboration supported by UNESCO. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with the Department of Culture and Tourism of Bandung City and the Bandung Creative City Forum (BCCF), supported by document analysis and secondary literature. Overall, Bandung's parallel diplomacy functions through synergy between governmental and societal actors, complementing Indonesia's national diplomacy agenda in strengthening the creative economy and culture.*

**Keywords:** *Parallel Diplomacy, Bandung City of Design, UNESCO.*

**A. Pendahuluan**

Pada 11 Desember 2015, UNESCO secara resmi menetapkan Kota Bandung sebagai anggota UNESCO Creative Cities Network (UCCN) dalam kategori desain (UNESCO, 2015). Konsep *City of Design* yang diusung bersifat multisektoral, mencakup dimensi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga tidak hanya menekankan estetika, tetapi juga pembangunan kota berbasis kreativitas. Penetapan ini memberikan legitimasi dan pengakuan global bagi Bandung, setelah sebelumnya Indonesia mendorong lima kota: Solo, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, dan Pekalongan untuk mengajukan diri ke UCCN sejak 2012. Setelah Pekalongan lolos pada 2014, Bandung menyusul pada 2015 sebagai *City of Design*.<sup>1</sup> Keanggotaan Bandung dalam UCCN merupakan hasil dari proses kolaboratif jangka panjang yang melibatkan aktor Penta Helix (Academia, Business, Communities, Government, dan Media) melalui tiga fase utama, yakni *connect, collaborate, dan commerce/celebrate*.<sup>2</sup> Pendekatan ini memungkinkan penguatan jejaring, konsolidasi kapasitas, serta lahirnya

---

<sup>1</sup> Chan, J., Lee, K., & Santosa, H. (2019). *Creative Cities in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publishing, hlm. 112-115

<sup>2</sup> UNESCO. (2019). *Bandung: UNESCO Creative City of Design – Monitoring Report*. Paris: UNESCO, hlm. 8.

berbagai program kreatif. Berangkat dari pola tersebut, riset ini menyoroti peran aktor governmental dan societal yang paling berpengaruh, yaitu Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bandung Creative City Forum, Forum Design Bandung, dan Bandung Film Council. Sinergi antarpihak ini membentuk fondasi strategis bagi perumusan gagasan, pengembangan program, hingga implementasi kebijakan kota kreatif.

Menurut Disbudpar Kota Bandung, pengembangan *City of Design* bertumpu pada tiga elemen utama, yaitu *place*, *people*, dan *ideas*.<sup>3</sup> Keunggulan demografis Bandung yang didominasi generasi muda mendorong tumbuhnya komunitas kreatif lintas subsektor. Pengembangan ruang kolaboratif seperti Bandung Creative Hub memperkuat aspek *place*, sementara program inovatif seperti *DesignAction.bdg* dan *Design Thinking Modules for Schools* merepresentasikan dimensi *ideas*. Keanggotaan dalam UCCN juga membuka peluang kolaborasi internasional, termasuk kerja sama lintas kota seperti Santos–Bandung *Film Festival*. Secara global, Bandung menjadi bagian dari jejaring 49 kota *City of Design* dunia, seperti Berlin, Montreal, Seoul, Shanghai, dan Singapura.<sup>4</sup> Partisipasi aktif dalam forum internasional, termasuk UNESCO Creative Cities Design Summit 2023 di Shanghai, menunjukkan peran Bandung sebagai aktor subnasional yang progresif dalam hubungan luar negeri. Hal ini menegaskan praktik diplomasi paralel, di mana kota dapat berperan langsung di tingkat internasional tanpa bergantung sepenuhnya pada negara.<sup>5</sup>

Fenomena pengakuan internasional terhadap Bandung sebagai *City of Design* tidak terlepas dari dinamika tata kelola perkotaan yang semakin kompleks di era globalisasi. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, kota-kota dunia memainkan peran yang semakin signifikan sebagai aktor non-negara, terutama dalam jejaring seperti UCCN yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antaranggota.<sup>6</sup> Bandung, yang dikenal sebagai kota kreatif sejak era kolonial melalui arsitektur Art Deco-nya, berhasil memanfaatkan warisan budaya dan modal sosialnya untuk membangun citra sebagai pusat inovasi desain di Asia Tenggara. Proses ini sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan top-down yang terpusat menuju model kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta secara setara.<sup>7</sup> Oleh karena itu, keberhasilan Bandung dalam

---

<sup>3</sup> UNESCO. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>4</sup> UNESCO. (2025). *UNESCO Creative Cities Network: List of Design Cities*. Tersedia di: <https://en.unesco.org/creative-cities/design> (diakses 10 April 2025).

<sup>5</sup> Dermawan, W. & Akim. (2020). "Paralel Diplomacy by Local Government in Creative City Development: Bandung as UNESCO City of Design". *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), hlm. 189-191.

<sup>6</sup> Sassen, S. (2018). *Cities in a World Economy* (edisi ke-5). Thousand Oaks: Sage Publications, hlm. 74-76.

<sup>7</sup> Landry, C. (2017). *The Creative City Index: Measuring the Pulse of the Urban Creative Economy*. Bristol: Comedia, hlm. 103.

mempertahankan status UCCN hingga saat ini menjadi indikator penting bagi kapasitas kelembagaan lokal dalam merespons tuntutan global sekaligus menjaga keunikan budaya lokal.

Kajian tentang peran aktor *governmental* dan *societal* dalam implementasi Bandung sebagai *City of Design* masih terbatas, padahal sinergi keduanya merupakan kunci keberlanjutan program kota kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kontribusi spesifik Pemerintah Kota Bandung (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), Bandung Creative City Forum, Forum Design Bandung, dan Bandung Film Council dalam setiap fase UCCN, mulai dari *connect* (membangun jejaring), *collaborate* (konsolidasi program), hingga *commerce/celebrate* (komersialisasi dan promosi). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, riset ini juga mengeksplorasi bagaimana interaksi keempat aktor tersebut membentuk ekosistem kreatif yang responsif terhadap tantangan urban, seperti keterbatasan anggaran, gentrifikasi, dan inklusi sosial. Temuan riset ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan tidak hanya bagi Bandung, tetapi juga bagi kota-kota lain di Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menjadi anggota UCCN atau mengoptimalkan keanggotaan yang telah ada.

## B. Pembahasan

### 1. Diplomasi Paralel.

Secara umum, diplomasi paralel merujuk pada aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor di luar pemerintah pusat, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, dan aktor non-negara lainnya, yang menjalankan fungsi-fungsi diplomasi secara mandiri atau paralel dengan diplomasi resmi negara.<sup>8</sup> Istilah paradiplomasi mulai dikenal secara luas pada dekade 1980-an melalui tulisan-tulisan Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos, yang mempopulerkan istilah ini sebagai kependekan dari *parallel diplomacy*.<sup>9</sup> Dalam pandangan beberapa akademisi, diplomasi paralel dipahami sebagai keterlibatan langsung aktor-aktor subnasional dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mendukung, melengkapi, memperbaiki, meniru, atau bahkan menantang diplomasi resmi negara pusat.<sup>10</sup> Fenomena keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, yang dikenal sebagai diplomasi paralel, telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>11</sup> Perkembangan ini

---

<sup>8</sup> Ivo Duchacek, "The International Dimension of Subnational Self-Government," *Publius: The Journal of Federalism* 14, no. 4 (1984): 5-31.

<sup>9</sup> Rodrigo Tavares, *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players* (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 12.

<sup>10</sup> Panayotis Soldatos, "An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign Policy Actors," dalam *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*, ed. Hans J. Michelmann dan Panayotis Soldatos (Oxford: Clarendon Press, 1990), hlm. 17.

<sup>11</sup> Ivo Duchacek, Daniel Latouche, dan Garth Stevenson, *Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of Subnational Governments* (New York: Greenwood Press, 1988); Brian

merupakan hasil dari transformasi pada tingkat negara dan sistem internasional, serta evolusi politik dan ekonomi di dalam wilayah-wilayah itu sendiri.<sup>12</sup> Menurut Aldecoa dan Keating, terdapat tiga motivasi utama yang mendorong pemerintah daerah melakukan paradiplomasi:<sup>13</sup>

a. Aspek Ekonomi

Diplomasi paralel dimanfaatkan daerah untuk menarik investasi asing, memperluas akses pasar, serta mendorong alih teknologi guna mendukung modernisasi ekonomi lokal. Secara keseluruhan, paradiplomasi ekonomi berperan strategis dalam mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing daerah di kancah global dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah yang seringkali menghadapi keterbatasan akses internasional. Beberapa daerah bahkan menjalin kolaborasi antar wilayah untuk mengoptimalkan sinergi ekonomi, sebagaimana terjadi dalam pengembangan *industrial districts*.

b. Aspek Kultural

Wilayah dengan identitas bahasa atau budaya yang khas memanfaatkan paradiplomasi untuk memperkuat eksistensi budayanya di tingkat internasional, terutama ketika kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Melalui kerja sama dengan negara atau organisasi internasional, daerah dapat mempromosikan bahasa, kesenian, pendidikan, dan produk budayanya secara lebih luas.

c. Aspek Politik

Diplomasi paralel juga berfungsi sebagai instrumen politik bagi daerah, baik untuk memperkuat legitimasi identitas politiknya, maupun untuk menggalang pengakuan internasional atas aspirasinya. Selain memperluas jaringan dukungan internasional, paradiplomasi politik juga digunakan untuk memperkuat posisi elit politik lokal di dalam negeri.

Dalam riset ini, dapat dikatakan bahwa diplomasi paralel Kota Bandung untuk pengembangan *City of Design* adalah instrumen yang strategis untuk mendorong transformasi dalam aspek ekonomi dan kultural yang sering kali berjalan secara beriringan. McHugh memperluas definisi paradiplomasi yang merujuk pada aktivitas negosiasi dan bentuk interaksi internasional lain yang dilakukan oleh *sub-state* di bawah

---

Hocking, *Localizing Foreign Policy: Non-Central Governments and Multilayered Diplomacy* (London: Palgrave Macmillan, 1997).

<sup>12</sup> Francisco Aldecoa dan Michael Keating, eds., *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments* (London: Routledge, 2013), hlm. 3-5.

<sup>13</sup> Aldecoa dan Keating, *Paradiplomacy in Action*, hlm. 8-12.

negara berdaulat.<sup>14</sup> Meskipun berperan dalam hubungan internasional, *sub-state* tidak memiliki status kedaulatan berdasarkan hukum internasional, sehingga sewaktu-waktu dapat dibatasi oleh pemerintah pusat negara yang berdaulat. Aktivitas paradiplomasi umumnya terbatas pada isu-isu yang menjadi kepentingan langsung *sub-state* tersebut, khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang secara resmi diakui oleh hukum internasional melalui instrumen seperti Konvensi Wina dan berfokus pada keamanan serta stabilitas nasional secara menyeluruh, paradiplomasi cenderung menangani kepentingan-kepentingan spesifik yang bersifat lokal.

Menjalinkan hubungan antara satu kota dengan kota lainnya di luar negeri sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah umat manusia. Praktik serupa sudah dikenal sejak masa peradaban Yunani dan Mesir kuno.<sup>15</sup> Memasuki dekade 1970-an, di tengah gelombang globalisasi, aktivitas paradiplomasi semakin meluas. Beberapa kawasan dengan kekuatan ekonomi besar di Eropa, seperti Baden-Württemberg di Jerman, Catalonia di Spanyol, Lombardy di Italia, dan Rhône-Alpes di Prancis, menjalin aliansi strategis yang didasarkan pada keyakinan bahwa kekuatan ekonomi regional dapat memainkan peran penting dalam struktur Uni Eropa.<sup>16</sup> Ini membuktikan bahwa aktor-aktor subnasional seperti kota dan provinsi mampu membangun pengaruhnya sendiri di tingkat internasional tanpa harus bergantung sepenuhnya pada negara. Kemandirian ini memungkinkan kota-kota untuk melakukan kerja sama internasional dengan lebih luwes, tanpa harus terikat oleh kepentingan politik nasional

## 2. Tata Kelola Diplomasi Paralel Kota Bandung untuk Pengembangan *City of Design*

Sejak awal 2010-an, Pemerintah Kota Bandung secara bertahap membangun kapasitas kelembagaan untuk memposisikan diri sebagai pusat kreativitas dan desain, yang berpuncak pada keberhasilan meraih status UNESCO Creative Cities Network sebagai *City of Design* pada 2015. Proses ini menunjukkan kuatnya peran kepemimpinan dalam perencanaan jangka panjang, advokasi internasional, dan mobilisasi pemangku kepentingan. Namun, setelah periode kepemimpinan tersebut berakhir, agenda *City of Design* tidak lagi menjadi prioritas utama. Instabilitas kepemimpinan dan minimnya dukungan politik menyebabkan kapasitas pemerintah kota dalam mempertahankan posisi Bandung di jaringan UNESCO melemah, baik dari sisi perencanaan, pelaporan, maupun diplomasi kota.

---

<sup>14</sup> Kevin McHugh, "Paradiplomacy: Sub-State Actors and International Relations," *The Hague Journal of Diplomacy* 10, no. 2 (2015): 185-186.

<sup>15</sup> Tavares, *Paradiplomacy*, hlm. 25.

<sup>16</sup> Tavares, *Paradiplomacy*, hlm. 67-68.

Dalam kondisi tersebut, peran diplomasi paralel Bandung justru banyak dijalankan oleh aktor non-pemerintah, khususnya komunitas kreatif yang telah lebih dulu membangun ekosistem dan jejaring internasional secara organik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berada dalam posisi dilematis: secara formal menjadi koordinator *City of Design*, tetapi secara substantif bergantung pada kapasitas komunitas seperti Bandung Creative City Forum sebagai *focal point*. Praktik "berjejaring" yang dilakukan komunitas ini sejatinya merupakan bentuk diplomasi paralel yang bersifat simbolik dan politis, karena pengakuan internasional dipakai untuk memperkuat posisi tawar mereka sekaligus menegaskan identitas Bandung sebagai kota desain di tingkat global.

Kapabilitas aktor daerah dalam menjalankan diplomasi paralel Kota Bandung bertumpu pada legitimasi yuridis yang memberikan dasar hukum bagi kerja sama luar negeri daerah. Aktor yang terlibat tidak hanya pemerintah kota, tetapi juga ekosistem komunitas kreatif, khususnya Bandung Creative City Forum (BCCF), yang berperan sebagai penggerak utama di lapangan. Kerangka regulasi yang berlapis dari tingkat nasional hingga daerah memberikan kepastian hukum bagi kolaborasi antara pemerintah dan komunitas, sehingga memungkinkan transformasi aktor lokal menjadi aktor internasional yang proaktif dalam pengembangan *City of Design* di bawah UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Pada tingkat nasional dan regional, diplomasi paralel Bandung didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 28 Tahun 2018, Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, serta regulasi Provinsi Jawa Barat yang menekankan penguatan inovasi dan daya saing global. Keselarasan regulasi ini menciptakan mekanisme koordinasi vertikal yang memastikan aktivitas diplomasi paralel daerah tetap berada dalam koridor kebijakan nasional, sekaligus memperkuat posisi tawar Kota Bandung dalam interaksi dengan mitra internasional.

Di tingkat lokal, mandat tersebut diinternalisasi melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta Perda Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021. Regulasi ini mengintegrasikan agenda *City of Design* ke dalam perencanaan pembangunan daerah, APBD, dan RPJMD, sekaligus menegaskan ekonomi kreatif sebagai sektor strategis dalam praktik diplomasi paralel Kota Bandung. Perda Nomor 1 Tahun 2021 juga memberikan pengakuan hukum terhadap komunitas kreatif sebagai mitra strategis pemerintah, termasuk pengakuan terhadap sifat formal dan informal komunitas. Pengaturan ini memungkinkan komunitas seperti BCCF bergerak lincah dalam jejaring internasional tanpa terikat rigiditas birokrasi, sekaligus memperoleh jaminan hak,

dukungan, dan fasilitasi dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan, integrasi regulasi lintas level ini membentuk *vertical alignment* yang memperkuat kapabilitas strategis Kota Bandung dalam menjalankan diplomasi paralel melalui sinergi antara legitimasi negara dan kreativitas komunitas.

Secara konseptual, diplomasi paralel Kota Bandung dalam pengembangan identitas sebagai *City of Design* menunjukkan paralelitas yang kuat dengan arah diplomasi nasional Indonesia. Paralelitas ini tercermin dalam keselarasan tata kelola, kepentingan nasional dan sub-nasional, serta fungsi diplomasi yang dijalankan aktor daerah. Diplomasi paralel Bandung tidak berdiri terpisah dari diplomasi negara, melainkan berfungsi sebagai perpanjangan kepentingan nasional melalui pendekatan berbasis kota dan ekonomi kreatif. Keselarasan regulasi dari tingkat pusat hingga kota memberikan legitimasi yuridis yang kuat, sementara sektor ekonomi kreatif menjadi medium utama yang menghubungkan kepentingan lokal Bandung dengan agenda nasional penguatan ekonomi kreatif dan partisipasi Indonesia dalam UNESCO Creative Cities Network. Peran aktor non-pemerintah memperkuat paralelitas tersebut, khususnya melalui inisiatif Bandung dalam membangun jejaring kreatif nasional. Pembentukan Indonesia Creative Cities Network (ICCN), yang dipelopori oleh aktor komunitas Bandung, mencerminkan kontribusi diplomasi paralel kota dalam memperluas dampak kebijakan kreatif ke tingkat nasional. Jejaring ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi lintas kota, pertukaran praktik baik, advokasi kebijakan, serta penguatan kapasitas lokal, sekaligus menegaskan posisi Bandung sebagai penggerak ekosistem kota kreatif Indonesia yang menjembatani kebutuhan daerah dan kepentingan nasional.

Paralelitas diplomasi juga tampak pada dimensi ekonomi dan kultural sebagaimana dikemukakan Aldecoa dan Keating.<sup>17</sup> Melalui jejaring internasional, Bandung tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai *City of Design*, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan nasional melalui pembukaan akses pasar, peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif, dan penguatan citra Indonesia di tingkat global. Dalam dimensi budaya, keterlibatan Bandung yang berkelanjutan dalam UCCN sejak 2015 menjadikan identitas *City of Design* sebagai instrumen diplomasi publik dan *soft power* Indonesia. Dengan demikian, diplomasi paralel Kota Bandung bersifat saling melengkapi dengan diplomasi nasional, baik dalam aspek ekonomi maupun budaya, tanpa menggeser peran negara sebagai aktor utama hubungan internasional.

---

<sup>17</sup> Aldecoa dan Keating, *Paradiplomacy in Action*, hlm. 10-11.

### 3. Praktik Diplomasi Paralel Kota Bandung untuk Pengembangan *City of Design*

Praktik diplomasi paralel pada level pemerintahan Kota Bandung dalam pengembangan *City of Design* dianalisis menggunakan kerangka fungsi diplomasi *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961, meliputi fungsi *representing*, *promoting*, *negotiating*, dan *reporting*.<sup>18</sup> Pemerintah Kota Bandung, sebagai anggota UNESCO Creative Cities Network (UCCN) sejak 2015, secara aktif memanfaatkan ruang diplomasi subnasional untuk membangun hubungan internasional di luar jalur diplomasi negara. Keikutsertaan rutin dalam UCCN *Annual Meeting* menjadi sarana utama bagi Bandung untuk merepresentasikan identitas kota kreatifnya, memperkuat legitimasi global, serta memperluas jejaring kerja sama antarkota kreatif di tingkat internasional. Partisipasi konsisten Bandung dalam berbagai UCCN *Annual Meeting* di Eropa dan Amerika Latin menunjukkan komitmen jangka panjang dalam menjalankan fungsi *representing* dan *promoting*. Melalui forum ini, Pemerintah Kota Bandung khususnya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengakses praktik terbaik internasional, model kebijakan kota kreatif, serta peluang kolaborasi lintas kota. Diplomasi paralel tersebut berdampak langsung pada penguatan ekosistem desain lokal melalui program pertukaran desainer, proyek ko-kreasi, dan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

Fungsi *representing*, *promoting*, *negotiating*, dan *reporting* juga terwujud secara simultan dalam penyelenggaraan *Connecti:City Conference* di Bandung pada 2022 dan 2023. Kegiatan ini memposisikan Bandung sebagai simpul diplomasi kreatif regional dengan mempertemukan kota-kota kreatif dari Indonesia, ASEAN, dan Eropa, serta didukung oleh institusi budaya internasional. Melalui *Creative Cities Dialogue*, Bandung memfasilitasi perumusan agenda kolaboratif kawasan, termasuk proyek bersama dan pembangunan narasi kreatif ASEAN, yang memperoleh legitimasi tambahan dari konteks kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan forum G20. Selain itu, fungsi *reporting* dan *promoting* tercermin dalam penyusunan *Policy Brief Connecti:City 2022* serta keterlibatan Bandung dalam *Beyond Urban Conference* sebagai bagian dari *Road to G20 Summit*. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya disampaikan ke kelompok kerja G20, tetapi juga memperkuat posisi Bandung sebagai aktor strategis dalam diplomasi perkotaan global. Rangkaian praktik ini menunjukkan kemampuan Kota Bandung dalam memanfaatkan jejaring UCCN, UNESCO, dan momentum forum global untuk mengartikulasikan kepentingan lokal secara paralel

---

<sup>18</sup> *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961, Pasal 3, ayat 1 (a)-(d).

dengan agenda nasional, sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah sebagai aktor diplomasi yang semakin signifikan dalam tata kelola global berbasis kota dan kreativitas.

Selain peran pemerintah daerah, praktik diplomasi paralel Kota Bandung juga dijalankan secara signifikan oleh aktor *societal*, khususnya komunitas kreatif dan masyarakat sipil. Desentralisasi dan otonomi daerah membuka ruang bagi aktor non-pemerintah untuk terlibat langsung dalam hubungan internasional kota, sehingga diplomasi tidak lagi bersifat eksklusif negara. Dalam konteks ini, komunitas kreatif berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan lokal dan jaringan global dengan memanfaatkan kreativitas, budaya, dan inovasi sebagai instrumen diplomasi.

Praktik tersebut mencerminkan fungsi diplomasi sebagaimana dirumuskan dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, terutama *representing, promoting, negotiating, dan reporting*.<sup>19</sup> Bandung Creative City Forum (BCCF) merupakan aktor *societal* paling berpengaruh dalam praktik diplomasi paralel Bandung. Sejak berdiri pada 2008, BCCF berperan sebagai wadah kolaboratif yang menjembatani akademisi, pelaku industri kreatif, komunitas, dan pemerintah kota. Salah satu inisiatif utamanya, *DesignAction.bdg* (DA.bdg), menjadi medium utama diplomasi kreatif berbasis desain melalui pendekatan *design thinking* terhadap isu-isu perkotaan. Program ini tidak hanya merepresentasikan Bandung sebagai *City of Design* dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network (UCCN), tetapi juga berfungsi sebagai sarana promosi praktik desain partisipatif dan pembangunan berkelanjutan yang berakar pada konteks lokal.

Peran diplomasi paralel BCCF semakin menonjol melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional, seperti UCCN *Annual Meeting*, ASEAN Creative Cities Forum, *Smart City Expo & Conference*, *Global Social Economy Forum* (GSEF), serta *Creative Industries Federation International Summit*. Dalam berbagai forum tersebut, BCCF tidak hanya mempresentasikan identitas Bandung secara simbolik, tetapi juga membawa praktik konkret, seperti *urban games* dan *Fashion Village Lab*, yang menekankan integrasi kreativitas, teknologi, dan partisipasi komunitas. Pengakuan internasional terhadap DA.bdg 2017 sebagai praktik terbaik SDG 11 memperkuat legitimasi Bandung sebagai mitra dialog yang setara dalam jejaring kota kreatif global. Selain BCCF, aktor *societal* lain seperti Forum Desain Bandung dan Bandung Film Council turut memperluas cakupan diplomasi paralel Bandung melalui medium desain dan sinema. Keterlibatan mereka dalam jejaring regional seperti *Southeast Asian Creative*

---

<sup>19</sup> *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, Pasal 3.

*Cities Network* (SEACCN) serta kolaborasi lintas kota, *Santos-Bandung Film Festival* antar UCCN menunjukkan bahwa representasi Bandung di forum internasional tidak selalu dimediasi oleh jalur diplomasi formal negara. Konfigurasi ini menegaskan bahwa pengembangan Bandung sebagai *City of Design* ditopang oleh diplomasi berbasis masyarakat, di mana komunitas kreatif berperan sebagai aktor representatif, produsen pengetahuan, sekaligus penggerak kolaborasi global yang berkelanjutan

### C. Kesimpulan

Riset ini menunjukkan bahwa tata kelola diplomasi paralel Kota Bandung dalam pengembangan *City of Design* menunjukkan keberhasilan diplomasi kota yang tidak semata ditentukan oleh regulasi formal, melainkan oleh kombinasi antara kapasitas kepemimpinan politik, kekuatan organik komunitas kreatif, legitimasi yuridis, serta keselarasan dengan diplomasi nasional. Pergantian posisi wali kota sangat memengaruhi arah dan kekuatan diplomasi paralel Bandung; ketika komitmen politik melemah, peran pemerintah kota menurun dan bergeser ke komunitas kreatif. Dengan dukungan kerangka regulasi yang selaras dari pusat hingga daerah dan orientasi pada ekonomi kreatif sebagai keunggulan strategis, diplomasi paralel Bandung tidak berjalan terpisah dari diplomasi negara, melainkan menjadi perpanjangan kepentingan nasional dalam memperkuat daya saing ekonomi dan budaya Indonesia di tingkat global.

Riset ini juga menunjukkan bahwa Kota Bandung telah secara aktif menjalankan praktik diplomasi paralel dalam pengembangan identitasnya sebagai *City of Design* melalui berbagai keterlibatan dalam jejaring internasional dan program kolaboratif lainnya. Dapat disimpulkan bahwa praktik diplomasi paralel di Kota Bandung telah berlangsung secara nyata dan berkelanjutan melalui sinergi antara aktor pemerintah dan aktor societal. Praktik diplomasi paralel ini tidak berdiri sebagai aktivitas yang terpisah dari diplomasi nasional, melainkan berjalan secara paralel dan saling melengkapi dengan agenda diplomasi Indonesia, terutama dalam kerangka penguatan ekonomi yang beriringan dengan budaya

### Referensi

- Aldecoa, Francisco, dan Michael Keating, ed. *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. London: Routledge, 2013.
- Chan, J., Lee, K., dan Santosa, H. *Creative Cities in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publishing, 2019.
- Dermawan, W., dan Akim. "Paralel Diplomacy by Local Government in Creative City Development: Bandung as UNESCO City of Design". *Jurnal Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2020): 189-191.
- Duchacek, Ivo. "The International Dimension of Subnational Self-Government." *Publius: The Journal of Federalism* 14, no. 4 (1984): 5-31.
- Duchacek, Ivo, Daniel Latouche, dan Garth Stevenson. *Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of Subnational Governments*. New York: Greenwood Press, 1988.

- Hocking, Brian. *Localizing Foreign Policy: Non-Central Governments and Multilayered Diplomacy*. London: Palgrave Macmillan, 1997.
- Landry, Charles. *The Creative City Index: Measuring the Pulse of the Urban Creative Economy*. Bristol: Comedia, 2017.
- McHugh, Kevin. "Paradiplomacy: Sub-State Actors and International Relations." *The Hague Journal of Diplomacy* 10, no. 2 (2015): 185-186.
- Michelmann, Hans J., dan Panayotis Soldatos, ed. *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Sassen, Saskia. *Cities in a World Economy*. Edisi ke-5. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.
- Soldatos, Panayotis. "An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign Policy Actors." Dalam *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*, diedit oleh Hans J. Michelmann dan Panayotis Soldatos, 17-35. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Tavares, Rodrigo. *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- UNESCO. *Bandung: UNESCO Creative City of Design – Monitoring Report*. Paris: UNESCO, 2019.
- UNESCO. "UNESCO Creative Cities Network: List of Design Cities." Diakses 10 April 2025. <https://en.unesco.org/creative-cities/design>.
- Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*. Pasal 3.